
**INVESTASI DAERAH SEBAGAI PENDORONG KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH:
PERAN MODERASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

Dewi Salmita¹, William Indra S. Mooduto², Femilia Zahra³, Muhammad Ikbal Abdullah⁴

¹*Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*, ²*Universitas Bina Mandiri Gorontalo*, ^{3,4}*Universitas
Tadulako*

Email: ¹ dewisalmita27@gmail.com, ² william.mooduto@gmail.com, ³ femilia.zahra@untad.ac.id, ⁴
ikbalabdullah@untad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi daerah, ukuran pemerintah daerah, dan leverage terhadap kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS) melalui software WarpPLS 8.0, dengan jumlah observasi sebanyak 65 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah dan leverage tidak berpengaruh signifikan. Pada uji moderasi, belanja modal tidak memperkuat pengaruh investasi daerah maupun leverage terhadap kemandirian keuangan daerah, namun memperkuat pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Investasi Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Belanja Modal

1. INTRODUCTION

Sejak era reformasi, Indonesia berupaya membangun sistem otonomi daerah yang efektif untuk mewujudkan *good governance*. Berbagai regulasi telah berubah, mulai dari UU No. 22/1999 hingga UU No. 23/2014, yang memberi kewenangan luas dan tanggung jawab proporsional kepada daerah dalam pengelolaan sumber daya nasional (Maulana, 2019). Melalui UU No. 23/2014, pemerintah daerah diharapkan

mencapai kemandirian fiskal, yakni kemampuan membiayai pembangunan tanpa ketergantungan besar pada dana pusat (Haptari et al., 2024). Kemandirian ini penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan pemerataan antarwilayah, yang bergantung pada kemampuan daerah mengelola pendapatan asli daerah, menarik investasi, dan menerapkan inovasi tata kelola berbasis teknologi (Amri et al., 2023). Namun, kenyataannya banyak daerah

masih bergantung pada pemerintah pusat karena rendahnya kontribusi PAD dibanding dana transfer yang diterima.

Tabel 1. Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Derajat Desentralisasi Tahun 2023

Derajat Desentralisasi	2020	2021	2022	2023	2024
Sangat Kurang (0-10%)	1	1	1	3	3
Kurang (>10-20%)	5	4	0	2	2
Cukup (>20-30%)	7	4	7	6	6
Sedang (>30-40%)	10	12	6	7	7
Baik (>40-50%)	4	5	7	7	8
Sangat Baik (>50%)	7	8	13	13	12
Jumlah	34	34	34	38	38

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Data menunjukkan bahwa meskipun jumlah provinsi dengan derajat desentralisasi baik dan sangat baik terus meningkat, kategori sedang hingga kurang masih mendominasi. Pada 2020–2022, sebagian besar provinsi masih berada dalam tahap transisi menuju desentralisasi yang optimal, dan meski pada 2023–2024 terjadi perbaikan, lebih dari separuh provinsi tetap berada pada kategori sedang ke bawah, menandakan otonomi daerah belum merata. Selain itu, berdasarkan laporan dari Kompas.id, hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah di Indonesia masih tergolong sangat rendah, meskipun kebijakan desentralisasi fiskal telah diterapkan selama lebih dari dua dekade. Riza Annisa Pujarama,

Peneliti di Center of Macroeconomics and Finance INDEF, menjelaskan bahwa tingkat otonomi fiskal di tingkat kabupaten/kota merupakan yang paling rendah. Hal ini terlihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih di bawah 20 persen dari total pendapatan daerah, sehingga menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Theodora, 2023).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan kemandirian keuangan daerah sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola, membiayai, dan mempertanggungjawabkan keuangannya secara mandiri dalam kerangka prinsip desentralisasi. Untuk mencapai kemandirian tersebut, pemerintah daerah dituntut mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna

meningkatkan sumber penerimaan daerah. Upaya ini dapat diwujudkan melalui peningkatan investasi daerah, penguatan ukuran atau kapasitas fiskal pemerintah daerah, serta pengelolaan leverage secara bijak agar tidak menimbulkan ketergantungan fiskal. Selain itu, efektivitas pengelolaan belanja modal berperan penting sebagai faktor yang dapat memperkuat hubungan antara ketiga aspek tersebut dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Investasi yang dilakukan pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan dan mendorong kemandirian keuangan daerah. Jika diarahkan pada sektor produktif dan infrastruktur, investasi publik mampu memperluas basis pajak, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah (Mulyani et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Suratno, (2018) menyatakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal dan investasi jangka panjang terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Namun, pelaksanaannya di Indonesia sering kali tidak efisien karena lemahnya analisis kelayakan investasi dan lemahnya pengawasan pengelolaan aset daerah. Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Afiah et al., (2021), Mirsan et al., (2019) dan Yusiawati & Marhaeni, (2020) yang menyatakan investasi berpengaruh positif terhadap derajat kemandirian fiskal daerah

namun tidak sejalan dengan penelitian (Susanto & Murtini, 2015) menyatakan investasi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pemerintah daerah berukuran besar cenderung lebih efektif dalam menyediakan layanan publik tertentu karena memiliki kapasitas fiskal, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang lebih memadai (Ruben & Tigran, 2022). Menurut Siburian et al., (2021), ukuran pemerintah daerah mencerminkan sejauh mana besarnya kekuasaan dan kapasitas suatu pemerintah daerah, yang dapat diukur melalui jumlah aset, jumlah pegawai, maupun tingkat produktivitasnya. Aset yang dimiliki pemerintah daerah berperan sebagai sarana strategis yang memberikan nilai tambah dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sabono & Firmansyah, 2024) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aziz & Kusumawati, (2024) dan Rofiq & Arza (2021) yang menyatakan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Pemanfaatan sumber pendanaan melalui utang secara efisien dapat mendukung pemerintah daerah dalam merealisasikan berbagai proyek pembangunan yang bersifat

produktif, sehingga berkontribusi pada peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah. Daerah dengan tingkat leverage yang tinggi menunjukkan tingkat ketergantungan yang besar terhadap sumber pembiayaan eksternal atau pinjaman dalam memenuhi kebutuhan pendanaan asetnya (Sedek & Kusumawati, 2024). Hasil penelitian yang dilakukan Rofiq & Arza (2021) dan Adinata & Efendi, (2022) menyatakan leverage berpengaruh terhadap kemandirian daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Aini et al., 2025) leverage tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Pemanfaatan belanja modal dalam penyediaan infrastruktur dan sarana pelayanan publik menjadi faktor penting dalam mendorong kemandirian daerah, karena ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan efisiensi layanan serta memperluas potensi penerimaan daerah. Penelitian yang dilakukan Malau & Parapat, (2020) menyatakan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan & Solehudin (2023), Riyadi, (2022), Yusiawati & Marhaeni, (2020) menyatakan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andriana (2020) dan Harahap et al., (2024) menyatakan belanja modal tidak

berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan Yudiastuti et al., (2025) menyatakan belanja modal secara signifikan memperkuat pengaruh hubungan PAD dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, (Pinem et al., 2020) menyatakan belanja modal mampu memoderasi DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dan (Sukarmi & Iga, 2016) menyatakan interaksi alokasi belanja modal memperkuat pengaruh tingkat ketergantungan keuangan dan kemandirian keuangan pada pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan keuangan daerah di berbagai wilayah Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, rendahnya transparansi pada tahap perencanaan dan pengelolaan anggaran, serta ketidaksesuaian antara alokasi dana dan kebutuhan prioritas pembangunan. Selain itu, kebijakan dan program yang diterapkan sering kali belum mampu memberikan solusi yang efektif serta masih minim inovasi. Realisasi anggaran yang belum optimal sesuai target dan jadwal yang ditetapkan juga menjadi hambatan dalam mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang efisien dan tepat sasaran (PPID Brida Prov. Sulteng, 2024). Hampir semua daerah di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki keunggulan masing-masing dalam

potensi lingkungan, wisata bahari, dan wisata alam, yang seharusnya dapat memberikan kontribusi keuangan bagi daerahnya masing-masing. Sumber daya potensial yang dimiliki oleh daerah-daerah di Sulawesi Tengah sangat melimpah, sehingga diharapkan kinerja keuangan setiap daerah juga baik (Salmita, 2023).

Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel dari penelitian sebelumnya dengan fokus pada wilayah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Tengah dan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang. Belanja modal ditetapkan sebagai variabel moderasi karena hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten terkait perannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi daerah, ukuran pemerintah daerah, dan leverage terhadap kemandirian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan belanja modal sebagai variabel moderasi.

2. LITERATURE REVIEW

a. Teori Agency

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara DPRD sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen, di mana DPRD mewakili rakyat untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah yang wajib mempertanggungjawabkan hasilnya (Zelmiyanti, 2016). Hubungan ini juga

terjadi antara pemerintah pusat dan daerah, di mana daerah melaksanakan pelimpahan wewenang dari pusat. Namun, konflik kepentingan dapat muncul ketika pemerintah daerah lebih mengutamakan kepentingan pribadi akibat ketimpangan informasi, yang dapat memicu penyalahgunaan wewenang (Primadiva et al., 2021). Pemerintah daerah memiliki akses informasi keuangan lebih luas dibanding DPRD, yang berperan mengawasi agar penggunaan dana publik tetap sesuai kepentingan masyarakat (Anynda & Hermanto, 2020).

b. Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (Mahmudi, 2010:142), kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi. Sejalan dengan itu, Halim (2014:278) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah memperoleh dan mengelola pendapatan sendiri untuk membiayai seluruh aktivitasnya. Dengan demikian, kemandirian keuangan daerah dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara optimal tanpa ketergantungan besar pada transfer dana dari pusat, yang diukur melalui rasio kemandirian daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi

keuangan dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Rasio Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2004)

c. Investasi Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang *Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah*, yang dimaksud dengan investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang, baik dalam bentuk pembelian surat berharga maupun investasi langsung, yang diharapkan dapat memberikan pengembalian nilai pokok beserta manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemandirian daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin besar pula kemampuannya dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan secara efektif. Sebaliknya, jika ukuran pemerintah daerah kecil, maka pelaksanaan aktivitas dan fungsi pemerintahan cenderung kurang optimal

(Sabono & Firmansyah, 2024). Menurut (Noviyanti & Kiswanto, 2016) ukuran pemerintah daerah (size) merupakan salah satu karakteristik yang memengaruhi kinerja keuangan daerah, yang ditunjukkan melalui besarnya total aset yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki keunggulan dalam menjalankan kegiatan operasional, sehingga mampu memberikan pelayanan publik secara lebih optimal (Millenia, 2022a).

e. Leverage

Menurut Halkadri (2019:134), leverage menggambarkan perbandingan antara utang pemerintah daerah dengan ekuitas atau aset yang dimiliki. (Mahmudi, 2010:111) menambahkan bahwa leverage digunakan kreditor untuk menilai kemampuan pemerintah daerah membayar kewajibannya, sedangkan Kawatu (2019:70) menyatakan leverage menunjukkan sejauh mana aset atau ekuitas dibiayai oleh utang. Dengan demikian, leverage merupakan

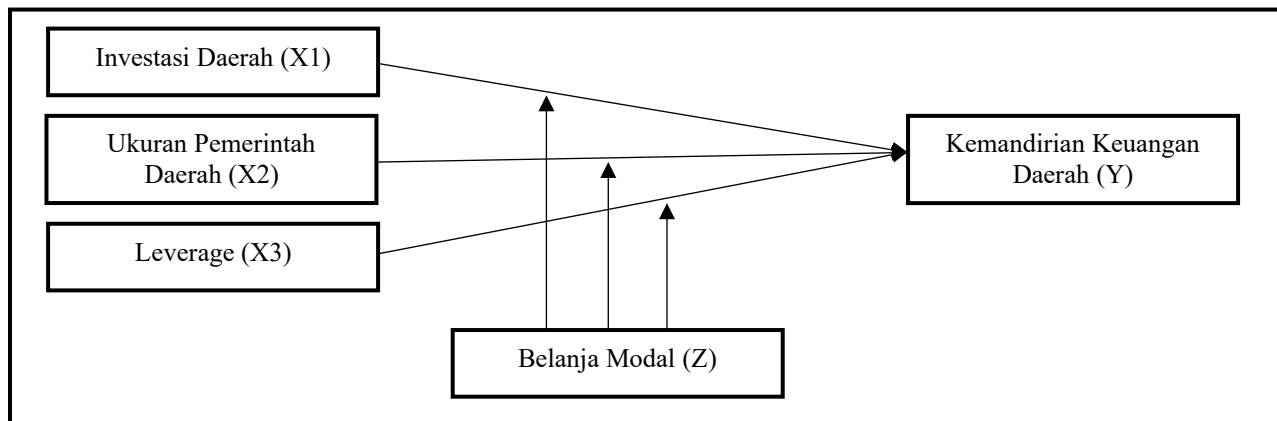
rasio yang membandingkan total kewajiban dengan ekuitas atau aset pemerintah daerah guna mengukur kemampuan dalam memenuhi utang.

f. Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*, belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran serta menambah aset atau kekayaan

daerah, yang selanjutnya dapat menimbulkan belanja rutin seperti pemeliharaan. Sejalan dengan itu, (Halim, 2014:107) menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

g. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber : Data Diolah, 2025

Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁: Investasi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah

H₂: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah

H₃: Leverage berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah

H₄: Belanja modal memperkuat pengaruh investasi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah

H₅: Belanja modal memperkuat pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah

H₆: Belanja modal memperkuat pengaruh leverage terhadap kemandirian keuangan daerah

3. METHODS

Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei yaitu penelitian yang menggunakan urutan sampel dari suatu populasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diperoleh dari website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 13 Pemerintah Daerah dengan periode pengamatan selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling, dimana teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah semua yang ada dalam populasi yaitu sebanyak 65 pengamatan Pemerintah Daerah selama tahun 2020 sampai tahun 2024. Adapun sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Sampel

No	Pemerintah Daerah
1.	Kota Palu
2.	Kabupaten Banggai
3.	Kabupaten Banggai Kepulauan
4.	Kabupaten Banggai Laut
5.	Kabupaten Buol
6.	Kabupaten Donggala
7.	Kabupaten Morowali
8.	Kabupaten Morowali Utara
9.	Kabupaten Parigi Mautong
10.	Kabupaten Poso
11.	Kabupaten Sigi
12.	Kabupaten Tojo Una-Una
13.	Kabupaten Toli-Toli

Sumber: Data Diolah, 2025

Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan software WarpPLS versi 8. Metode ini merupakan

pendekatan berbasis varian yang dinilai powerful karena tidak memerlukan asumsi statistik ketat seperti distribusi normal multivariat atau bebas multikolinieritas

(Ghozali, 2015). Selain berfungsi untuk menguji hubungan antarvariabel laten secara prediktif, PLS juga dapat digunakan untuk mengonfirmasi

teori serta menganalisis konstruk dengan indikator reflektif maupun formatif.

Tabel 4. Matriks Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Kemandirian Keuangan Daerah DJPK, (2018)	Rasio Kemandirian Daerah = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Investasi Daerah Permendagri Nomor 52 Tahun 2012)	Investasi Daerah = Σ Investasi Jangka Panjang	Rasio
Ukuran Pemerintah Daerah (Rofiq & Arza, 2021)	Ukuran Pemerintah Daerah = Σ Aset	Rasio
Leverage (Fitra, 2019)	Debt to Equity Ratio = $\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$	Rasio
Belanja Modal PP Nomor 71 Tahun 2010	Proporsi Belanja Modal = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Data Diolah, 2025

4. RESULT AND DISCUSSION

a. Statistik Deskriptif

Hasil dari pengumpulan data sekunder mengenai Kemandirian Daerah, Investasi Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage dan Belanja Modal pada kabupaten/kota di

Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020-2024, maka hasil tentang statistic deskriptif yang meliputi nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum variabel penelitian disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Deskriptif Analisis

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian_Daerah	.0357	.3509	.102043	.0679477
Investasi_Daerah	7,695,215,606	155,672,681,602	41,841,134,364.63	30,379,500,617.744
Ukuran_Pemerintah_Daerah	1,203,203,484,311	4,484,724,310,205	2,452,869,842,022.78	650,321,419,692.203
Leverage	.0006	.1131	.020295	.0234016
Belanja_Modal	.0980	.2787	.169871	.0443988

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, data penelitian diolah untuk memperoleh nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel yang diteliti. Pada tabel 5 terlihat bahwa penelitian ini menggunakan 65 data observasi, yang mencakup variabel dependen dan independen dengan karakteristik sebagaimana dijelaskan berikut:

b. Kemandirian Daerah

Berdasarkan pada tabel 5 diatas bahwa nilai minimum sebesar 0.0357 dan maksimum 0.3509, dengan nilai rata-rata 0.102043 serta standar deviasi 0.0679477. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Tengah masih tergolong rendah, di mana Kabupaten Morowali tahun 2024 memiliki tingkat kemandirian tertinggi karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif besar dibandingkan kabupaten lainnya. Komponen pajak yang mengalami kenaikan signifikan diantaranya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan yang merupakan pendapatan penghasilan daerah hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. sedangkan Kabupaten Banggai Laut tahun 2021 menunjukkan tingkat kemandirian terendah.

c. Investasi Daerah

Berdasarkan pada tabel 5 diatas bahwa nilai minimum tercatat sebesar 7.695.215.606 dan

maksimum mencapai 155.672.681.602, dengan nilai rata-rata 41.841.134.364,63 serta standar deviasi 30.379.500.617,744. Hasil ini menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup besar antarwilayah dalam realisasi investasi daerah. Kota Palu pada tahun 2024 menjadi daerah dengan nilai investasi tertinggi. Penyertaan modal tersebut tersebar pada enam entitas, yakni PT Bank Sulawesi Tengah, Perusahaan Daerah Kota Palu, PDAM Kota Palu, PT Citra Nuansa Elok, PT Pusaka Jaya Palu Power, dan PT Bangun Palu Sulawesi Tengah. Sementara Kabupaten Sigi tahun 2020 memiliki nilai investasi terendah dimana pada tahun tersebut kabupaten sigi hanya berinvestasi pada PT. Bank Sulteng.

d. Ukuran Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada tabel 5 diatas bahwa ukuran pemerintah daerah, yang diukur melalui total aset daerah, memiliki nilai minimum sebesar 1.203.203.484.311 dan maksimum 4.484.724.310.205, dengan rata-rata 2.452.869.842.022,78 serta standar deviasi 650.321.419.692,203. Nilai ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal pemerintah daerah di Sulawesi Tengah cukup bervariasi. Kabupaten Morowali pada tahun 2024 menempati posisi tertinggi dalam ukuran pemerintah daerah karena besarnya nilai aset yang dimiliki sedangkan Kabupaten Banggai Laut pada tahun

2021 menjadi daerah dengan nilai aset paling rendah.

e. Leverage

Berdasarkan pada tabel 5 diatas bahwa nilai minimum 0.0006 dan maksimum 0.1131, dengan nilai rata-rata 0.020295 dan standar deviasi 0.0234016. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Sulawesi Tengah memiliki tingkat ketergantungan yang relatif rendah terhadap pembiayaan utang. Kabupaten Banggai Laut tahun 2020 tercatat memiliki leverage tertinggi karena terdapat kenaikan yang cukup ekstrim pada utang belanja dan transfer, sedangkan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 memiliki leverage terendah.

f. Belanja Modal

Berdasarkan pada tabel 5 diatas bahwa nilai minimum tercatat sebesar 0.0980 dan maksimum 0.2787, dengan nilai rata-rata 0.169871 serta standar deviasi 0.0443988. Kabupaten Morowali tahun 2024 memiliki proporsi belanja modal tertinggi dengan fokus pada pengadaan peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan, sedangkan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2021 memiliki proporsi terendah akibat alokasi anggaran yang lebih besar pada belanja operasi.

g. Hasil Pengujian Model Struktural (Inner Model)

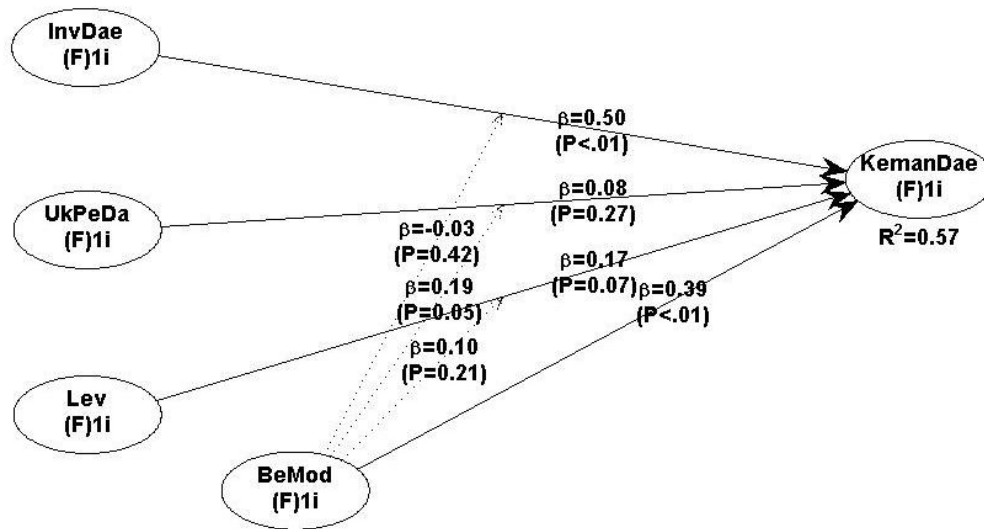
Tabel 6. Hasil Pengujian Model Struktural

Kriteria	Nilai	Standar Ukuran	Keterangan
1. Koefisien Determinasi (R-Square)	0.57	0,75 (substansial), 0,50 (moderat), 0,25 (lemah)	Moderat
2. Relevansi prediktif (predictive relevance)	0.736	Q (Squared) > dari 0	Baik
3. Ukuran Efek (F-Squared / Effect Size)	$\frac{InvDae = 0.5}{UkPeDa = 0.08}$	(0,02) lemah, (0,15) medium, (0,35) kuat	Kuat
	$Lev = 0.17$		Medium
	$BeMod = 0.39$		Medium
			Kuat
4. Model Fit			
a. <i>Average Path Coefficient (APC)</i>	0.209, p=0.019	Nilai p APC < 0,05	Model Fit
b. <i>Average R-squared (ARS)</i>	0.570, p<0.001	Nilai p ARS < 0,05	Model Fit
c. <i>Average adjusted R-squared (AARS)</i>	0.517, p<0.001	Nilai p AARS < 0,05	Model Fit
d. <i>Average variance inflation factor (AVIF)</i>	1.929	Nilai AVIF < 5	Model Fit
e. <i>Average full collinearity VIF (AFVIF)</i>	1.805	Nilai AFVIF < 5	Model Fit

Sumber: Data Diolah, 2025

h. Hasil Pengujian Hipotesis

Skema analisis moderasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Model Persamaan Analisis Moderasi

Sumber : Data diolah peneliti

Hipotesis diuji berdasarkan nilai p-value dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Jika p-value $\leq 0,05$, hipotesis diterima; sedangkan jika p-value $\geq 0,05$, hipotesis ditolak. Hasil

pengujian ditunjukkan melalui koefisien jalur (path coefficients) dan p-value pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Path Coefficients	P-Values	Keterangan
H ₁	0.505	<0.001	Diterima
H ₂	0.075	0.269	Ditolak
H ₃	0.175	0.070	Ditolak
H ₄	-0.026	0.418	Ditolak
H ₅	0.194	0.050	Diterima
H ₆	0.096	0.213	Ditolak

Sumber: Data Diolah, 2025

i. Hasil Analisis Efek Moderasi

Variabel moderasi diidentifikasi melalui interaksi antara variabel independen dan moderasi dalam memprediksi variabel

dependen. Jenis moderasi ditentukan berdasarkan nilai signifikansi persamaan regresi yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 7. Perbandingan Persamaan Efek Moderasi

Persamaan	Nilai Signifikansi						
	b_1X_1	b_2X_2	b_3X_3	b_4Z	b_5X_1Z	b_6X_2Z	b_7X_3Z
2	<0.001	0.041	0.031	<0.001			
3	<0.001	0.269	0.070	<0.001	0.418	0.050	0.213

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa pada hipotesis keempat, belanja modal memperkuat pengaruh investasi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan b_4 signifikan dan b_5 tidak signifikan, sehingga berperan sebagai variabel predictor atau independen. Pada hipotesis kelima, belanja modal juga memperkuat pengaruh ukuran pemerintah daerah, dengan b_4 dan b_6 signifikan, sehingga berperan sebagai quasi moderator. Sementara pada hipotesis keenam, belanja modal memperkuat pengaruh leverage terhadap kemandirian keuangan daerah dengan b_4 signifikan dan b_7 tidak signifikan, yang berarti berfungsi sebagai variabel predictor atau independen.

j. Pengaruh Investasi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan, menandakan semakin besar investasi, semakin tinggi kapasitas fiskal daerah. Temuan ini sejalan dengan agency theory, di mana pemerintah daerah sebagai *agent* dituntut mengelola sumber

daya publik secara efisien untuk mengurangi *agency cost* dan meningkatkan kemandirian fiskal.

Penelitian Afiah et al., (2021), Fidiatuljana et al., (2025), Mirsan et al., (2019) Yusiawati & Marhaeni, (2020) juga menunjukkan bahwa investasi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal. Secara rata-rata, investasi di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan nilai tertinggi di Kota Palu dan terendah di Kabupaten Sigi. Investasi pemerintah daerah umumnya berbentuk penyertaan modal pada BUMD, yang menjadi instrumen penting dalam memperkuat kemandirian keuangan dan mendorong aktivitas ekonomi daerah.

k. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya besarnya total aset tidak selalu mencerminkan kemampuan fiskal daerah. Dalam konteks teori keagenan, pemerintah daerah sebagai *agent*

seharusnya mengelola aset publik secara efisien untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada pusat. Namun, tanpa manajemen dan akuntabilitas yang baik, besarnya aset tidak berdampak signifikan pada peningkatan kemandirian fiskal.

Hal ini menunjukkan bahwa besarnya aset belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program dan operasional pemerintahan. Total aset yang besar tidak otomatis meningkatkan kinerja keuangan, karena efektivitasnya bergantung pada strategi pengelolaan aset yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu lebih fokus pada pemanfaatan aset produktif dan investasi jangka panjang, seperti infrastruktur, yang baru akan memberikan dampak positif dalam jangka waktu tertentu (Aziz & Kusumawati, 2024).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz & Kusumawati, (2024) dan Rofiq & Arza (2021), Millenia, (2022) dan Ramahdani & Trisnaningsih, (2022) yang menyatakan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

l. Pengaruh Leverage terhadap

Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Dalam kerangka *agency theory*, kondisi ini

menunjukkan bahwa *agent* (pemerintah daerah) cenderung bersikap konservatif dalam mengambil risiko pembiayaan, sehingga belum memanfaatkan instrumen utang secara strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi daerah. Tingkat leverage yang mencerminkan proporsi pembiayaan daerah melalui utang terhadap total ekuitas tidak memiliki pengaruh nyata dalam meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri.

Penggunaan utang (*leverage*) oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar bersifat jangka pendek dan digunakan untuk kebutuhan operasional. Selain itu nilai leverage pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah relatif rendah dibandingkan dengan total ekuitas atau aset daerahnya. Artinya, proporsi utang terhadap ekuitas sangat kecil, sehingga fluktuasi leverage tidak cukup besar untuk memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini et al., (2025), Khoirunnisa & Sofilda (2023), Julianti et al., (2024) leverage tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

m. Belanja Modal Memperkuat Pengaruh Investasi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa belanja modal tidak

memperkuat pengaruh investasi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya, peningkatan belanja modal pemerintah daerah tidak meningkatkan pengaruh investasi terhadap kemandirian fiskal secara signifikan. Meskipun investasi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan, besarnya belanja modal belum mampu memperkuat hubungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal pemerintah daerah belum diarahkan secara efektif untuk mendukung investasi yang produktif. Dengan demikian, investasi daerah yang dikelola dengan baik tetap dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian keuangan daerah, walaupun tanpa adanya dukungan belanja modal dari pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Aini et al., (2025) yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak mampu memoderasi pengaruh belanja operasional, dana alokasi umum, dan masa jabatan kepala daerah terhadap kinerja keuangan, yang diukur melalui rasio kemandirian daerah.

n. Belanja Modal Memperkuat Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa belanja modal memperkuat pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap

kemandirian keuangan daerah, namun belanja modal mampu memperkuat hubungan tersebut secara signifikan. Artinya, besarnya ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset yang dimiliki pemerintah daerah belum otomatis mencerminkan kemampuan daerah untuk mandiri secara fiskal, kecuali aset tersebut dimanfaatkan secara produktif melalui peningkatan belanja modal. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Aini et al., 2025) yang menunjukkan bahwa belanja modal dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan, yang diukur dengan rasio kemandirian.

o. Belanja Modal Memperkuat Pengaruh Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa belanja modal tidak memperkuat pengaruh leverage terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, serta belanja modal tidak memperkuat hubungan antara leverage dan kemandirian keuangan daerah. Artinya, tingkat utang pemerintah daerah tidak memengaruhi kemampuan fiskal untuk mandiri, dan belanja modal yang dikeluarkan juga tidak mampu meningkatkan efektivitas penggunaan utang tersebut.

(Ermawati & Aswar, 2020) menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Novindriastuti, (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa proporsi belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah.

5. CONCLUSIONS

Penelitian ini menunjukkan bahwa investasi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Peningkatan investasi, khususnya melalui penyertaan modal pada BUMD, mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Temuan ini menegaskan peran pemerintah daerah sebagai agent dalam mengelola sumber daya publik secara efisien untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Sebaliknya, ukuran pemerintah daerah dan leverage tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Besarnya total aset belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kemandirian fiskal, sementara penggunaan utang daerah yang relatif rendah dan bersifat operasional belum mampu meningkatkan kemampuan pembiayaan mandiri.

Peran belanja modal sebagai variabel moderasi menunjukkan hasil yang beragam.

Belanja modal tidak memperkuat pengaruh investasi daerah maupun leverage terhadap kemandirian keuangan daerah, namun mampu memperkuat pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa aset daerah baru memberikan kontribusi terhadap kemandirian fiskal apabila dimanfaatkan secara produktif melalui belanja modal.

6. REFERENCES

- Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Pengaruh leverage, ukuran pemerintahan daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(2).
- Afiah, N. N., Mulyani, S., & Ulfi, I. H. (2021). Investasi Daerah Dan E-Government Serta Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah. *Bina Ekonomi*, 25(2), 115–134.
- Aini, S. N., Sulaiman, S., & Aprianti, S. (2025). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 14(4), 2127–2137.
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105–113.

- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(10).
- Aziz, A. A., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 6984–6995.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2018). *Ringkasan APBD 2018 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.
- Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Assessing regional finance independence in Indonesian local governments. *European Journal of Business and Management Research*, 5(1).
- Fidiatuljana, F., Sugianto, S., Usman, E., & Yudistira, F. G. (2025). The Effect of Accountability on Investment in Encouraging Regional Independence (A Study on Provinces in Indonesia). *International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA)*, 2(12), 943–952.
- Fitra, H. (2019). *Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah*. Irdh.
- Ghozali, I. (2015). *Structural equation modeling metode alternatif dengan partial least square (PLS)*. Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.
- Halkadri, F. (2019). *Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah*. Irdh.
- Harahap, M. N., Yaqien, M. G. A., Sutjipto, H., & Desmawan, D. (2024). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016–2023. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 10(2), 139–152.
- Hermawan, R. R., & Solehudin, S. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Modal Keuangan Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 7434–7450.
- Julianti, H., Agustina, F., & Khoiriyah, Y. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,

- Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(2), 141–152.
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis laporan keuangan sektor publik*. Deepublish Publisher.
- Khoirunnisa, M., & Sofilda, E. (2023). Determinasi Kemandirian Daerah Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3823–3832.
- Latipah, S. L., Sutjipto, H., Ginanjar, R. A. F., Setyadi, S., & Didu, S. (2025). Analysis of factors affecting regional financial independence in primary leading sector districts. *Journal of Entrepreneurial Economic*, 2(1), 70–93.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. Penerbit UUP STIM YKPN.
- Malau, E. I., & Parapat, E. P. S. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337.
- Millenia, N. A. (2022a). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6), 786–803.
- Millenia, N. A. (2022b). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6), 786–803.
- Mirsan, M. A., Hamzah, N., & Sjufri, M. (2019). Pengaruh Investasi, Pdrb Perkapita Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Derajat Kemandirian Fiskal.(Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan). *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 82–98.
- Mulyani, H. S., Sudirno, D., & Hakim, A. (2021). Driving Factors for Local Government Self-Financing Ability. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 748(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/748/1/012028>
- Novindriastuti, I. (2020). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Penguatan Desentralisasi Fiskal (studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2018)*.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto, K. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012. (2012). *Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pinem, I., Malau, Y. N., & Mardha, F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017. *JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 3(2), 201–218.
- PPID Brida Prov. Sulteng. (2024). Gelar Sosialisasi dan Bimtek, BPKAD Bersama BRIDA Sulteng Tingkatkan Nilai Capaian IPKD. <https://Brida.Sultengprov.Go.Id/2024/07/05/Gelar-Sosialisasi-Dan-Bimtek-Bpkad-Bersama-Brida-Sulteng-Tingkatkan-Nilai-Capaian-Ipkd/>.
- Primadiva, P. P., Rosdini, D., & Mulyani, S. (2021). Pengaruh tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 299–310.
- Ramahdani, A. F., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh ukuran pemerintah dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kota Surabaya. *J. Econ. Bussines Account*, 6(1), 301–310.
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 298–314.
- Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 705–719.
- Ruben, H., & Tigran, M. (2022). Effective Local Governance: Large or Small Units (the Armenian Case). *Вопросы Государственного и Муниципального Управления*, 5, 134–151.
- Sabono, B. G., & Firmansyah, A. (2024). Pengaruh Infrastruktur dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2677–2685.
- Salmita, D. (2023). Analisis Risk Management Disclosure: Leverage, Profitabilitas dan Kepemilikan Publik (Studi pada Perbankan

- yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 52–66.
- Sedek, S. C. B. T., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Leverage, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9081–9100.
- Siburian, M. T., Abdullah, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(1), 1–26.
- Sukarmi, N. W., & Iga, N. B. (2016). Alokasi belanja modal sebagai pemoderasi pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(2016), 545–572.
- Suratno, A. P. S. (2018). *Effect of government investment and capital participation on local own-source revenue: The case of Indonesia*.
- Susanto, E. D., & Murtini, H. (2015). Karakteristik pemerintah daerah pendorong kemandirian keuangan daerah di Jawa Tengah. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
- Theodora, A. (2023). Dua Dekade Lebih Desentralisasi, Tata Kelola Dana Daerah Belum Efektif. <https://www.kompas.id/artikel/Dua-Dekade-Lebih-Desentralisasi-Tata-Kelola-Dana-Daerah-Belum-Efektif>.
- Yudiastuti, L. N., Sujana, E., & Sinarwati, N. K. (2025). Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 51–69.
- Yusiawati, D., & Marhaeni, A. (2020a). Effect of investment, GRDP percapita, and original local government revenue on regional financial independence through capital expenditure as intervening variables. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7(6), 96–108.
- Yusiawati, D., & Marhaeni, A. A. I. N. (2020b). Effect of investment, GRDP percapita, and original local government revenue on regional financial independence through capital expenditure as intervening variables. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*,

7(6), 96–108.

<https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n6.1016>

Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 11–21.